



BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Pembayaran Menggunakan QRIS

Pembeli membayar dengan memindai Quick Response (QR) Code Indonesia Standard (QRIS) di gerai UMKM di Tangerang, Banten, Kamis (6/10/2022). Sejak diimplementasikan per 1 Januari 2020, volume transaksi QRIS terus bertumbuh positif. Masyarakat semakin merasakan manfaatnya dalam penggunaan pembayaran digital, QRIS sebagai alat transaksi *merchant*. QRIS telah dimanfaatkan mulai dari pedagang mikro, kecil, menengah, dan besar, pada berbagai sektor usaha.

Permodalan Reasuransi Minim, Defisit Neraca Transaksi Berjalan Asuransi Membengkak

JAKARTA, ID – Neraca transaksi berjalan sektor asuransi dan dana pensiun tercatat defisit US\$ 461 juta, meningkat 60,06% secara *year on year* (yoy) pada kuartal II-2022. Permodalan yang masih minim di industri reasuransi menjadi salah satu faktor peningkatan defisit.

Oleh **Prisma Ardianto**

Laporan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dari Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa sektor asuransi dan dana pensiun menorehkan transaksi ekspor sebesar US\$ 45 juta dan transaksi impor US\$ 505 juta. Perolehan ini yang membuat defisit menjadi US\$ 461 juta per kuartal II-2022, atau naik 45,88% dibandingkan kuartal I-2022 sebesar US\$ 361 juta.

Jika diakumulasi sepanjang semester I-2022, defisit transaksi berjalan asuransi dan dana pensiun mencapai US\$ 777 juta, naik 42,30% dari defisit sebesar US\$ 546 juta pada semester I-2021. Asuransi dan dana pensiun berkontribusi sebesar 9,28% dari total defisit transaksi berjalan sektor jasa yang mencapai US\$ 4.967 juta pada kuartal II-2022.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) HSM Widodo menerangkan, *cash outflow* yang terjadi di sektor asuransi adalah premi-premi yang mengalir ke luar negeri. Meski begitu, harus juga dipahami bahwa dibalik premi yang disalurkan, ada *liabilitas* yang sebesar BNC kepada masyarakat selain dengan akhir tahun ini. Salah satu klaim yang bisa sedikit mendegradasi defisit yakni terkait kebakaran pabrik PT PCI di Batam senilai US\$ 113 juta. Menurut dia, sehingga tidak semestinya *cash outflow* dari sektor asuransi dipandang negatif. Apalagi menengok kemampuan perusahaan asuransi dan reasuransi dalam menyerap risiko saat ini masih cukup rendah. “Ekuitas reasuransi sekarang *kan* Rp 7,1 triliun, sehingga ada *cash out-*



HSM Widodo

terjadi,” Widodo kepada *Investor Daily*, Kamis (6/10).

Meski telah naik signifikan, defisit transaksi berjalan pada semester I-2022 masih sangat terbuka untuk diimbangi dengan klaim-klaim yang masuk sampai dengan akhir tahun ini. Salah satu klaim yang bisa sedikit mendegradasi defisit yakni terkait kebakaran pabrik PT PCI di Batam senilai US\$ 113 juta. Menurut dia, sehingga tidak semestinya *cash outflow* dari sektor asuransi dipandang negatif. Apalagi menengok kemampuan perusahaan asuransi dan reasuransi dalam menyerap risiko saat ini masih cukup rendah. “Ekuitas reasuransi sekarang *kan* Rp 7,1 triliun, sehingga ada *cash out-*

flow sebesar US\$ 461 juta. Seandainya ekuitas bisa disuntik dua kali lipat, pasti *cash outflow* itu akan berkurang juga karena bisa diserap sendiri,” kata dia.

Idealnya, kata Widodo, ekuitas asuransi umum dan reasuransi bisa seimbang. Realitasnya, ekuitas asuransi umum pada kuartal II-2022 mencapai Rp 69,4 triliun, sementara ekuitas sebesar Rp 7,1 triliun dari reasuransi masih membentuk ruang keterbatasan mendukung bisnis asuransi umum.

Widodo menerangkan, peran reasuransi bagi industri asuransi sangat besar. Apalagi rata-rata perusahaan asuransi umum hanya memiliki retensi risiko di bawah Rp 10 miliar. Sebagai gambaran, setidaknya reasuransi menyerap 50% premi dari bisnis asuransi umum. Ini tercermin dari premi reasuransi di kuartal II-2022 sebesar Rp 11,29 triliun, dengan premi asuransi umum sebesar Rp 22,41 triliun pada kuartal I-2022. Adapun perbedaan waktu pencatatan antara reasuransi selama tiga bulan ini sudah lumrah terjadi di industri.

Lebih lanjut, perusahaan reasuransi domestik pun memiliki retensinya sendiri. Jika risiko melewati retensi reasuransi domestik, maka risiko itu disebar ke perusahaan reasuransi luar negeri. Hal ini yang secara tidak langsung membuat neraca transaksi berjalan di sektor asuransi dan dana pensiun menjadi defisit.

Widodo menegaskan, bukan tidak mungkin di masa mendatang neraca transaksi berjalan di asuransi dan dana pensiun menjadi surplus. Namun hal ini

hanya bisa terjadi jika reasuransi nasional memiliki kekuatan ekuitas atau permodalan berlebih atau setidaknya lebih dari cukup. “Pada kondisi sekarang, kita belum sampai level itu. Karena potensi dalam negeri saja belum ditangkap secara maksimal, sehingga memang menjadi banyak (premi) yang keluar. Kita tidak mendorong untuk perusahaan, infrastruktur, dan ekosistem yang ada sekarang untuk menerima risiko dari luar dulu. Karena untuk menutup yang lokal saja masih perlu dipikirkan lebih lanjut,” jelas Widodo.

Risiko Asuransi Kredit

Dia menambahkan, asuransi kredit menjadi salah satu lini bisnis yang risikonya hanya ditanggung asuransi dan reasuransi dalam negeri. Nyatanya, bisnis ini menjadi sangat menantang ketika eksposur risiko kredit terpukul dan hanya berputar di dalam negeri.

Hal tersebut yang turut menjadi perhatian dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Baru-baru ini, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, perusahaan asuransi nasional perlu mulai mempertimbangkan menyebar pertanggunganan risiko ke luar negeri. Sehingga pada saatnya, risiko tidak hanya berputar di dalam negeri saja. “Sebagian risiko seyogyanya bisa kita *channel* luar domestik. Dengan demikian sebagian risiko di domestik tidak harus di-*handle* oleh domestik, tapi juga mendapatkan kontribusi dari dunia internasional,” jelas Suahasil.

apoteker yang ikut serta di ajang Bali Pharmacy Festival 2022.

Adapun rangkaian kegiatan Bali Pharmacy ini dimulai dengan penyelenggaraan Kongres Pemilihan Ketua Regional Bali di hari pertama, kemudian seminar dan *talkshow* nasional di hari kedua, dan ditutup dengan meriah oleh gelaran konser musik di hari ketiga.

“Salah satu tujuan utama BNC pada tahun ini adalah menjangkau semua kalangan, semua daerah, semua orang, dan kami buatlah kampanye #BuatSemua. Kami mencari cara yang efektif untuk dapat mengimplementasikannya. Salah satu cara yang kami pilih adalah berkolaborasi dengan komunitas dan juga media lokal. Sesuai dengan salah satu *value* yang kami miliki, Always Neo, kami selalu siap memberikan kejutan kepada masyarakat Indonesia melalui produk, layanan, ataupun rangkaian kegiatan seperti ini. Tunggu kabar terbaru dari kami, dan mari gelorakan semangat #BuatSemua,” jelas Maritsen. (th)

BNI Gandeng Pemprov Sulut Bantu Penataan Kawasan Wisata Bunaken

JAKARTA, ID – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sebagai pionir perbankan hijau atau *green banking* berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Sulawesi Utara (Sulut) melakukan penataan Kawasan Wisata Bunaken. Kolaborasi tersebut sebagai bentuk nyata BNI untuk kembali mendorong program kepedulian lingkungan dan sosial melalui Program BNI Berbagi guna memulihkan kondisi alam dan ekonomi masyarakat.

“Kami berharap program ini dapat bermanfaat bagi Kawasan Wisata Bunaken. Kita tahu pantainya sangat indah, maka dari itu tanggung jawab bagi kita juga untuk menjaga ekosistemnya agar selalu baik,” jelas Direktur Utama BNI Royke Tumilaar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (6/10) seperti dilansir *Antara*.

Adapun langkah pemulihan ekosistem wisata ini diawali dengan penyerahan bantuan penataan Kawasan Wisata dan Area Pujasera di Bunaken, Manado dari BNI kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara di Bunaken Manado, Selasa (4/10).

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara Henry Kaitjili, Kepala Taman Nasional Bunaken Nikolas Loli, Komisaris Utama BNI Agus Dermawan Wintarto Martowardojo, dan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengawali komitmen bersama ini. Awal komitmen bersama dilakukan dengan melepaskan tukik atau anak penyui, sekaligus penanaman kembali terumbu karang, guna memperkuat ekosistem laut sebagai komitmen untuk perlindungan dan pengembangan Taman Nasional Bunaken.

Royke menuturkan Bunaken adalah kawasan wisata yang membutuhkan kontribusi lebih untuk peningkatan kualitas dan ekosistem lautnya. Terlebih, kawasan ini semakin banyak didatangi oleh wisatawan sehingga banyak ekosistem-ekosistem laut yang membutuhkan perawatan lebih intensif. Sebagai agen pembangunan yang ditugaskan untuk penguatan konstruksi ekonomi berkelanjutan, BNI terus memperluas kemitraan bersama komunitas masyarakat sekaligus mendorong program-program kepedulian sosial yang berbasis lingkungan.

Dalam program penataan Kawasan Wisata Bunaken, jelas dia, BNI juga menggandeng masyarakat sekitar untuk dapat berdaya secara ekonomi dengan membangun ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). (th)



Royke Tumilaar

Edukasi, Inklusi, dan Literasi Keuangan Penting bagi Perlindungan Konsumen

JAKARTA, ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau pelaku usaha untuk terus menjaga dan meningkatkan aspek perlindungan konsumen di jasa keuangan di era digital ini. Beberapa cara jitu untuk memastikan perlindungan konsumen diantaranya bisa ditempuh melalui aspek edukasi, literasi, dan inklusi.

“Terkait perlindungan konsumen maka tentang edukasi, literasi, dan inklusi keuangan. Hal-hal ini yang memang perlu diperkuat di era digital,” ujar *Director Market Conduct* OJK Bernard Widjaja dalam webinar, Jumat (6/10).

Dia menjelaskan, aspek edukasi sangat diandalkan sebagai salah satu tahapan untuk pengguna jasa keuangan memahami manfaat dan tujuan dari produk/layanan jasa keuangan. Apalagi faktor yang paling besar menyebabkan terjadinya risiko adalah sebenarnya dari sisi pengguna, baru diikuti sebab bisnis proses dan kondisi. “Di dalam perkembangan era digital kita mungkin bisa menggunakan infrastruktur yang menjangkau pelaksanaan edukasi bisa sampai pelosok, yang sebelumnya tidak bisa terpikirkan, termasuk dengan sistem IT ini dilakukan bersama-sama atau kolaborasi,” ungkap Bernard.

Kemudian pada tahap inklusi, produk dan layanan jasa keuangan sudah mulai digunakan. Namun demikian, respons masyarakat ini harus diikuti dengan literasi yang baik agar penggunaan jasa keuangan bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misalnya, kata Bernard, pelaku usaha bisa terus meningkatkan adanya praktik-praktik legal kepada masyarakat. Hal ini menjadi penting agar kejadian yang tidak diinginkan kembali terulang. Dapat dengan menyuguhkan modul-modul dan sebagainya. “Jadi ketika kita sudah memberikan pengetahuan dan pemahaman, memanfaatkan produk dan layanan, sehingga terjadi peningkatan akses, jangan dilupakan sisi perlindungan konsumen, baik itu preventif maupun kuratif,” kata dia.

Bernard menyatakan, OJK ikut serta untuk memastikan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) menjalankan sejumlah tahapan tersebut. Lebih dari itu, OJK turut mengawasi pelaku bisnis mulai dari uji coba produk, memastikan pemasaran yang sesuai, perjanjian antara konsumen dan PUJK yang imbang, sampai memantau akses penanganan pengaduan.

Adapun OJK telah mengeluarkan POJK 6/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Pasal 46 menyatakan untuk PUJK mesti memiliki fungsi atau unit khusus dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Bernard menerangkan, pasal tersebut pada intinya merespons kepentingan masyarakat yang ingin melakukan pengaduan atau bahkan jika terjadi perselisihan dengan pihak PUJK. OJK menyerahkannya model pelaksanaan unit perlindungan konsumen ini kepada masing-masing PUJK dengan menyesuaikan model bisnis, aset, dan kondisi sumber daya manusia.

“Terkait rangkap jabatan, itu silakan. Tetapi hanya saja kami perhatikan jangan sampai ada konflik kepentingan. Misalnya, pejabat yang melakukan fungsi perlindungan konsumen adalah pejabat yang menjadi objek pengaduan. Hal ini harus dihindari agar penanganan dialihkan pada pejabat setara atau yang lebih tinggi,” jelas Bernard. (pri)



BeritaSatu Photo/Uthan AR

Sektor Keuangan Dalam Kondisi Cukup Baik

Nasabah menarik uang di ATM setor dan tarik di Jakarta, kemarin. Para pelaku industri perbankan untuk tak terlalu khawatir akan potensi resesi ekonomi yang mungkin terjadi tahun depan. Menurut Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, ketahanan sektor keuangan nasional saat ini dalam kondisi yang cukup baik.

Bank Neo Commerce Berikan Edukasi Literasi Keuangan ke Apoteker

JAKARTA, ID – PT Bank Neo Commerce Tbk, (BNC) semakin gencar menjalin kolaborasi dengan berbagai komunitas baik lokal maupun nasional. Perlahan namun pasti, ini menjadi bukti nyata dukungan yang diberikan oleh BNC kepada masyarakat selain dengan senantiasa menyediakan berbagai inovasi melalui produk dan fitur layanan yang semakin lengkap di aplikasi neobank.

Kali ini, BNC berkesempatan untuk dapat bersinergi bersama komunitas profesi berskala nasional, yaitu Ikatan Apoteker Indonesia dalam rangkaian acara Bali Pharmacy Festival 2022 yang diselenggarakan pada 22-24 September di Bali.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia 38,03%. Namun tingkat indeks inklusi keuangan atau akses masyarakat terhadap layanan keuangan cukup tinggi, yaitu mencapai 76,19%. Sementara itu, hasil riset terkait

Financial Fitness Index (2021) menunjukkan bahwa skor indeks kesehatan keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah hanya sebesar 37,72 dari skor maksimal 100. Dari riset ini, area *financial safety* masyarakat Indonesia masih sangat rendah dengan indikator meliputi kemampuan memenuhi kebutuhan finansial keluarga, menabung secara rutin, dan memiliki dana darurat untuk menghadapi situasi mende-sak. Dari sini, BNC melihat bahwa edukasi literasi keuangan masyarakat masih harus terus dilakukan secara berkelanjutan kepada berbagai lapisan masyarakat di Indonesia.

VP of Marketing Bank Neo Commerce Maritsen Darvita menjelaskan, kehadiran BNC di Bali kali ini cukup berbeda, karena BNC ingin memberikan literasi dan edukasi terkait keuangan kepada masyarakat, sejalan dengan arahan dari OJK. “Sebagai lembaga keuangan yang patuh, kami fokus mendukung gerakan dan program dari pemerintah. Dalam hal ini, kami

memberikan edukasi terkait pengelolaan keuangan di era digital kepada para apoteker dan praktisi kesehatan yang hadir dalam rangkaian acara Bali Pharmacy Festival 2022,” jelas Maritsen dalam keterangan tertulis, Rabu (5/10).

Menurut dia, upaya merangkul berbagai komunitas menjadi salah satu fokus BNC untuk memperkenalkan tentang bank digital dan layanan BNC kepada masyarakat. Dalam enam bulan terakhir BNC aktif hadir di berbagai acara komunitas di berbagai kota, yaitu di Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan Denpasar dalam rangkaian beberapa kegiatan acara, yaitu FEKDI 2022, Neo Keliling #BuatSemua, neobank Localfest, Indonesia Modifications and Lifestyle Expo (IMX) 2022, dan neobank Community. Adapun ragam komunitas yang ikut serta sangat beragam mulai dari para mahasiswa, komunitas *lifestyle* dan musik, komunitas otomotif, para praktisi dan masyarakat umum, serta para profesional seperti

Permudah Akses, PasarPolis Luncurkan TAP Insure



Cleosent Randing

JAKARTA, ID – PT PasarPolis Indonesia, perusahaan *insurance technology*, terus memperluas distribusi produk asuransi, kali ini dengan meluncurkan aplikasi TAP Insure yang merupakan *channel* distribusi terbaru PasarPolis. Bersama perusahaan Pialang Asuransi, PT PasarPolis Insurance Broker, TAP Insure menasar *end-customer* dan memungkinkan konsumen untuk mengakses produk asuransi secara langsung dari satu aplikasi. Inisiatif ini dapat diakses mulai 5 Oktober 2022 dengan mengunduhnya melalui AppStore dan Playstore. *Founder* dan CEO PasarPolis Cleosent Randing menjelaskan, TAP Insure menjadi salah satu inovasi PasarPolis dari *brand* terbarunya yaitu TAP, yang diharapkan akan semakin mendekatkan asuransi dengan keseharian masyarakat. Kehadiran TAP Insure ini sekaligus menandai hadirnya *brand* terbaru PasarPolis yaitu TAP, yang akan menjadi *brand* dari berbagai produk asuransi yang ditawarkan PasarPolis.

Selain itu, berbeda dengan bisnis yang selama ini diterapkan PasarPolis, aplikasi TAP Insure merupakan *channel* distribusi yang memungkinkan PasarPolis untuk dapat memasarkan produk asuransinya secara langsung kepada konsumen. “Hal ini kami lakukan untuk mengeliminasi hambatan berasuransi yang kerap timbul karena kurangnya akses dan proses berasuransi yang cenderung rumit. Inovasi ini juga merupakan strategi PasarPolis untuk terus menciptakan pengalaman berasuransi konsumen yang jauh lebih mudah diakses, terjangkau, dan menyenangkan,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Kamis (6/10).

Cleosent menjelaskan, pihaknya melihat bahwa kebiasaan masyarakat yang serba digital juga menciptakan kebutuhan berasuransi yang serba digital dan *seamless*. Kebutuhan akan berasuransi semakin melekat dengan kehidupan sehari-hari, terlebih lagi dengan potensi risiko yang akan selalu melekat di dalam aktivitas keseharian masyarakat.

“Kami optimistis dengan kehadiran TAP Insure akan membuat pengalaman konsumen dalam berasuransi menjadi *seamless* dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, karena semua dilakukan dalam satu aplikasi semudah nge-TAP saja, mulai dari pemilihan produk asuransi, pembelian, hingga klaim, dan tentunya dengan biaya premi yang terjangkau,” tambah Cleosent.

Pada tahap peluncuran ini, terdapat dua produk asuransi dalam aplikasi TAP Insure yang sudah bisa diakses oleh para konsumen. Pertama, Asuransi Perjalanan (Tap Travel). Pelanggan akan mendapatkan perlindungan dari risiko finansial saat melakukan perjalanan di dalam dan luar negeri, seperti adanya penundaan/pembatalan/gangguan perjalanan, bagasi hilang atau rusak, penundaan bagasi, koneksi pesawat yang terlewat, dan/atau perubahan rencana perjalanan. Harga premi yang dapat dibeli pelanggan dimulai dari Rp 25.000 dengan periode perlindungan mulai dari 1 hari.

Kedua, Asuransi Kecelakaan Diri (TAP Personal Accident). Dalam setiap perjalanan, risiko selalu mengikuti. Produk asuransi kecelakaan diri ini memberikan perlindungan yang mencakup cedera atau kematian yang timbul dari kecelakaan dengan premi yang dimulai dari Rp 56.250, dan waktu perlindungan mulai dari 6 bulan. Tidak hanya itu, produk TAP Personal Accident juga berlaku pada keadaan cedera dan kematian yang diakibatkan oleh tindakan kekerasan.

Ke depan, jelas Cleosent, PasarPolis berkomitmen untuk terus berinovasi mengembangkan jenis produk asuransi yang dapat diakses melalui aplikasi TAP Insure. Terkait proses klaim asuransi, konsumen dapat melakukannya melalui aplikasi, semudah seperti saat memilih polis asuransi yang semuanya dilakukan serba digital. Dalam upaya mendukung aktivitas digital yang akan dilakukan konsumen, PasarPolis telah memiliki sertifikasi ISO 27001 yang fokus menjamin sistem manajemen keamanan informasi. Tujuan dari sertifikasi ini adalah untuk menjamin keamanan data pelanggan yang merupakan salah satu komitmen utama PasarPolis. (th)



Investor Daily/David Gita Roza

Kartu ATM Beredar

Nasabah melakukan transaksi di ATM sebuah pusat belanja, Jakarta, kemarin. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), jumlah total kartu ATM yang beredar sebanyak 244,06 juta unit pada Juli 2022. Jumlah ini terdiri atas 4,58 juta unit kartu ATM dan 239,48 juta unit kartu ATM debit. Jika dibandingkan dengan posisi akhir 2021, jumlah total kartu ATM pada Juli 2022 sudah bertambah 17,75 juta unit kartu (7,85%). Rinciannya, kartu ATM turun 0,42 juta unit (8,45%) sementara kartu ATM debit bertambah 18,18 juta unit (8,21%).

Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang digagas oleh BI.

Direktur Utama Bank Muamalat Achmad K Permana mengungkapkan bahwa kemitraan ini menunjukkan komitmen Bank Muamalat sebagai pionir industri keuangan syariah di Tanah Air, untuk memperkuat struktur moneter yang berlandaskan prinsip syariah. Selain itu, untuk mendukung kebijakan Bank Indonesia mengenai pengelolaan instrumen

pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS).

“Sebagai pelaku industri perbankan syariah kami menyambut baik penyempurnaan instrumen PUAS yang dilakukan oleh Bank Indonesia lewat kehadiran SiPA. Kami optimistis dengan adanya SiPA, maka kolaborasi sesama bank syariah akan semakin baik, dan memberikan dampak positif pada peningkatan volume transaksi pasar sekunder domestik perbankan

syariah,” ungkap Permana dalam keterangan tertulis, Kamis (6/10).

Adapun Bank Indonesia telah menyempurnakan ketentuan PUAS melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/9/PBI/2020 pada 20 Juli 2020, yang mencabut PBI Nomor 17/4/PBI/2015. Sehingga, ketentuan baru tersebut berlaku mulai 22 Juli 2020. Penyempurnaan PBI PUAS antara lain penambahan instrumen baru PUAS berupa SiPA.

Oleh Nida Sahara

Ketua Dewan Komisiner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pemulihan ekonomi saat ini utamanya didukung oleh industri perbankan yang mengucurkan kredit ke sektor swasta. Hal ini juga yang menyebabkan Indonesia cukup resilien di tengah volatilitas global. “Karena kalau bank tidak salurkan kredit, (ekonomi) kita tidak akan *recover*. Dari tahun 2020 sampai sekarang, kredit bank negatif dan baru mulai positif pada pertengahan 2021, sekarang sudah 10,6% (Agustus 2022). Artinya, perbankan sudah berikan dorongan kuat untuk ekonomi pulih, karena bankir-bankir cerdas ini,” ungkap Purbaya, Kamis (6/10).

Purbaya menambahkan, peran perbankan itu lebih besar karena dapat membuat roda perekonomian kembali berputar. Pihaknya juga monitor kepercayaan masyarakat terhadap bank tinggi sejak pandemi Covid-19 hingga sekarang, karena tidak ada masyarakat yang berbondong-bondong menarik uangnya di bank. “Dukungan bank itu besar, kalau bank diam saja, kita akan susah tumbuh. Makanya saya optimis dengan fungsi intermediasi yang baik, ekonomi akan tumbuh baik ke depan, masyarakat cukup diharap tenang,” ujar dia.

Di sisi kondisi makro ekonomi, Purbaya juga mengharapkan agar tidak berlomba menaikkan suku bunga meskipun suku bunga global



Purbaya Y Sadewa

telah meningkat dan akan berlanjut. Pasalnya, siklus di Amerika Serikat (AS) berbeda dengan Indonesia, di AS perekonomian tumbuh terlalu cepat, sedangkan Indonesia baru masuk pemulihan. “Amerika itu tumbuh terlalu cepat, kepanasan, kita baru *recover* jadi jauh dari panas. Jangan sampai kita membunuh ekonomi, mereka ngerem pertumbuhan karena kepanasan, kita harus hati-hati. Kalau mereka naikan kencang, kita jangan ikut-ikutan, karena fase ekonominya beda,” jelas dia.

Berdasarkan pengalaman Indonesia mulai dari 1998, 2008, 2015, 2018, dan 2020 biasanya mendapatkan pelajaran, kebijakan seperti apa yang cocok untuk mendukung perekonomian tetap tumbuh. “Selama menjaga momen

ekonomi domestik, jangan takut ekonomi kita hancur, fokus menjaga momentum, jaga *demand* domestik tentu saja itu tidak bisa dilakukan kalau kebijakannya ketat. Di sisi lain, perbankan kita buat tenang masyarakat, agar tidak buat gangguan di bank, bahwa uang mereka aman di bank, agar tidak panik,” papar Purbaya.

Dengan kondisi tersebut, LPS optimistis perekonomian Indonesia masih bisa tumbuh positif minimum sampai 2027. Apabila pintar dalam mengambil keputusan dan kebijakan, bisa tumbuh sampai dengan 2031. Terlebih, jika industri perbankan terus aktif menyalurkan kredatnya dengan pertumbuhan yang baik, maka ekonomi Indonesia bisa terus positif. “Karena siklus ekonomi kita itu tujuh tahun, kalau pintar-pintar atur kebijakan bisa sampai 10 tahun,” ucap dia.

Tantangan Perbankan

Purbaya juga memaparkan sejumlah tantangan yang perlu dicermati industri perbankan ke depan. Pertama, dampak dari risiko global meskipun pandemi sudah mereda, namun terganggunya rantai pasok di global membuat kenaikan inflasi dan juga harga energi. Hal ini membuat perlambatan ekonomi dunia, bahkan diperkirakan akan resesi global.

Tantangan kedua, literasi keuangan yang masih rendah, di mana dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks inklusi keuangan nasional di level 76,19%, sedangkan indeks literasi keuangan baru 38,03%. “Ini artinya 7

dari 10 masyarakat telah mengakses produk jasa keuangan, tapi hanya 4 dari 10 orang yang paham apa itu produk jasa keuangan. Ini masih ada gap yang signifikan, pemahaman masyarakat terbatas atas produk keuangan berdampak pada timbulnya risiko buruk kepada masyarakat, seperti penipuan,” tutur Purbaya.

Tantangan ketiga yaitu digitalisasi, perkembangan yang begitu cepat dapat memunculkan risiko keamanan siber. Untuk itu, industri perbankan juga diminta selalu memperkuat sistem keamanan sibernya agar infrastruktur perbankan dapat meminimalkan terjadinya kejahatan siber. Tantangan terakhir adalah pendalaman pasar keuangan di Indonesia yang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Terlihat dari kapitalisasi pasar modal Indonesia pada 2020 sebesar 46,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan, Filipina 75,4%, Thailand 108,7%, dan Malaysia mencapai 129,5% terhadap PDB.

Selain itu, rasio *financial system deposit* yang mencakup total giro, tabungan, dan deposito yang ada pada sistem keuangan Indonesia baru 41,2% terhadap PDB pada 2021. Sementara itu, Filipina mencapai 77,7%, Malaysia sebesar 122,6%, dan Thailand mencapai 135,6% terhadap PDB. “Pendalaman pasar keuangan di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara peers. Perlu ditingkatkan supaya peran pasar keuangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan semakin tinggi,” pungkas dia.



Achmad K Permana

Dukung Kebijakan BI, Bank Muamalat Gandeng Tujuh Bank Syariah

JAKARTA, ID – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA) dengan tujuh bank syariah yaitu Bank Mega Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank BTPN Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Aladin, Bank NTB Syariah, dan unit usaha syariah Bank Kaltimara. Kerja sama ini dilakukan sebagai salah satu rangkaian kegiatan

Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang digagas oleh BI.

Direktur Utama Bank Muamalat Achmad K Permana mengungkapkan bahwa kemitraan ini menunjukkan komitmen Bank Muamalat sebagai pionir industri keuangan syariah di Tanah Air, untuk memperkuat struktur moneter yang berlandaskan prinsip syariah. Selain itu, untuk mendukung kebijakan Bank Indonesia mengenai pengelolaan instrumen

pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS).

“Sebagai pelaku industri perbankan syariah kami menyambut baik penyempurnaan instrumen PUAS yang dilakukan oleh Bank Indonesia lewat kehadiran SiPA. Kami optimistis dengan adanya SiPA, maka kolaborasi sesama bank syariah akan semakin baik, dan memberikan dampak positif pada peningkatan volume transaksi pasar sekunder domestik perbankan

Penerbitan ketentuan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan operasi moneter berdasarkan prinsip syariah dan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.

Sebelumnya, Bank Muamalat juga telah menandatangani kesepakatan bersama Master Agreement transaksi SiPA dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan BJB Syariah pada April 2022. (mid)